



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

### SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 1 dan 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710 TELEPON : (021) 344-9230 PSW. 5205, 5206, (021) 3843417 FAKSIMILI (021) 3454640 LAMAN: [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

#### NOTA DINAS NOMOR ND-1182/PB.1/2023

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Standardisasi Kegiatan Penguatan Integritas di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan  
Tanggal : 6 April 2023

Dalam rangka penguatan integritas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagai *Treasurer, Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor* di daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu aksi strategis penguatan integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta respon atas arahan Menteri Keuangan untuk melakukan penguatan nilai-nilai integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah disusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-82/PB/2023 tanggal 17 Maret 2023 hal Penguatan Integritas pada Ditjen Perbendaharaan.
2. Untuk mendukung dan mengoptimalkan langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan integritas tersebut, telah disusun Standardisasi Kegiatan Penguatan Integritas pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, meliputi:
  - a. Penguatan Integritas Internal
  - b. Penguatan Integritas Eksternal
  - c. Penguatan Integritas melalui Strategi Komunikasi dan Internalisasi
3. Standardisasi kegiatan di atas selanjutnya agar dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dengan detail pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir.
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN diminta untuk dapat menyusun rencana aksi serta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam standardisasi kegiatan dimaksud.
5. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan langkah-langkah strategis tersebut, UKI-I pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Didyk Choeroel



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur di Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
3. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

TANGGAL : 6 April 2023

## **TERM OF REFERENCE**

### **STANDARDISASI KEGIATAN PENGUATAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima sebagaimana tertuang dalam *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Integritas berperan utama dalam mewujudkan *good governance* sehingga integritas menjadi hal yang krusial bagi setiap institusi pemerintah. Maraknya tindakan korupsi di Indonesia mampu mencederai integritas yang pada akhirnya akan mengancam tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Mengacu hasil survei indeks persepsi korupsi atau IPK tahun 2022 yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. (skor semula 38 menjadi 34).

Di samping itu, pengukuran integritas juga dilakukan oleh KPK terhadap institusi pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2022, KPK telah melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 640 instansi, termasuk salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Dari hasil penilaian SPI tahun 2022, Indeks SPI Kemenkeu adalah sebesar 89,45 mengalami penurunan sebesar 0,91 poin dibandingkan dengan indeks SPI tahun 2021 yaitu sebesar 90,37. Hal ini menunjukkan masih adanya kerawanan terjadinya praktik korupsi di Kementerian Keuangan.

Semangat pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkan, namun juga pada ancaman terhadap budaya integritas yang menurun. Korupsi tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi, yaitu melemahkan daya saing nasional. Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, "kita tidak seharusnya mengkhianati rekan-rekan (yang bekerja jujur) dan mengkhianati nilai-nilai yang kita coba bangun di Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan."

DJPb selaku unit kerja di lingkungan Kemenkeu memiliki *concern* dan *awareness* yang tinggi dalam menguatkan integritas. Dalam rangka mendorong upaya tersebut, DJPb secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi secara berkelanjutan, salah satunya dengan mengikuti penilaian ZI WBK/WBBM sejak tahun 2013, Penerapan Manajemen Risiko dan Pemantauan Penerapan SPIP.

Mempertimbangkan hal tersebut, dirasa perlu untuk memperkuat integritas kepada seluruh unit kerja di lingkup DJPb secara kontinyu melalui **Standardisasi Kegiatan Penguatan Integritas di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan**.

#### **II. TUJUAN DAN MANFAAT**

Standarisasi Kegiatan Penguatan Integritas di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan *awareness* terhadap nilai-nilai integritas dan anti korupsi organisasi dan pegawai. Hasil Standarisasi Kegiatan Penguatan Integritas diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan DJPb untuk menjaga integritas organisasi baik dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi maupun di luar organisasi;
- b. Menciptakan strategi komunikasi yang tepat sebagai cerminan Ditjen Perbendaharaan yang berintegritas;
- c. Menjadi sarana *refreshment* bagi seluruh peserta dan *transfer knowledge* bagi para pejabat/pegawai baru; dan

- d. Menghimpun kendala yang dialami dan masukan dari unit kerja vertikal.
- e. Mendorong peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung budaya integritas unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- f. Meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan Keuangan Negara oleh Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan.

### III. BENTUK KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

#### A. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

##### 1. Penguatan Integritas Internal

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
1	Doa bersama dan arahan pagi	1x	Hari	Kepala Kanwil DJPb dan/atau Pej. Administrator	Briefing	Seluruh Pegawai	Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi
2	Morning Call	Min 1x	Minggu	Kepala Kanwil DJPb	Rapat Internal	Seluruh Pejabat Eselon III dan IV	1. Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi 2. Pembahasan Isu strategis terkait Integritas
3	Pelaksanaan senam/olah raga bersama	Min 1x	Minggu	Kepala Kanwil DJPb dan/atau Kepala Bagian Umum	Outdoor	Seluruh Pegawai	1. Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi 2. Arahan Kepala Kanwil terkait konsistensi dalam menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama Nilai Integritas.
4	Pembinaan Mental dan Kerohanian	Min 1x	Triwulan	Kepala Kanwil DJPb	GKM	Seluruh Pegawai	Materi tematik : 1. Integritas seorang Pemimpin (Februari) 2. Jujur dalam Segala Tindakan (Mei) 3. Penyalahgunaan Wewenang adalah Kezaliman (Agustus) 4. "Pencuri" dalam birokrasi (November)
5	Refresment Materi Terkait Tusi dan Service Excellent	Min 1x	Bulan	Seluruh Bagian/Bidang	GKM	Seluruh Pegawai	1. Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop 2. Standard pelayanan masing-masing tusi 3. Service Excellent
6	Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja	Min 1x	Triwulan	Kepala Bidang SKKI	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi tematik: 1. Kode Etik dan Perilaku Kemenkeu (Triwulan I) 2. Pengelolaan Gratifikasi (Triwulan II) 3. Penanganan Benturan Kepentingan (Triwulan III) 4. Sosialisasi Kewajiban Pelaporan LHKPN/LHK (Triwulan IV)

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
7	Evaluasi Pengelolaan SDM	Min 1x	Triwulan	Kepala Bagian Umum	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internalisasi Kebijakan SDM (rotasi, mutasi dan promosi) dan hasil evaluasi kebijakannya</li> <li>2. Internalisasi Kebijakan Rekrutmen Pegawai Non ASN serta hasil evaluasi kebijakannya</li> <li>3. Internalisasi Kebijakan secondment, diklat dan IJV serta hasil evaluasi kebijakannya</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Anggaran Kanwil selaku Satker	Min 1x	Triwulan	Kepala Bagian Umum	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) serta bebas dari Penyalahgunaan anggaran, dan KKN</li> <li>2. Area rawan korupsi, suap dan gratifikasi di lingkungan DJPb</li> <li>3. kebijakan perjadin, honorarium dan pelaksanaan kegiatan rapat di luar kantor.</li> <li>4. Kebijakan Implementasi Gerakan Efisiensi</li> </ol>
9	Capacity Building/Internal Gathering Kanwil DJPb	Min 1x	Triwulan	Kepala Kanwil DJPb	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi komplemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas dalam Pelaksanaan Tugas</li> <li>2. Implementasi Budaya Egaliter (Ngobrol Santai dengan Pimpinan)</li> <li>3. Menjaga Integritas diri, teman dan lingkungan Kerja</li> <li>4. Membangun negeri melalui Pelayanan ke Para <i>Stakeholders</i></li> </ol>
10	<i>Townhall Meeting</i> Penguatan Integritas	Min 1x	Triwulan	Kepala Kanwil DJPb	Rapat Internal/ Outdoor	Seluruh Pegawai	Materi Komplemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Integrity Is Our Identity</i> – Binalnas (April)</li> <li>2. Sosialisasi Anti Gratifikasi Mandiri – PPG (Juli)</li> <li>3. Sosialisasi Anti Korupsi (Oktober)</li> <li>4. Peringatan HAKORDIA (Desember)</li> </ol>
11	Pengujian Kepatuhan PBJ dan Pengelolaan Keuangan	Min 1x	Semester	Kepala Bidang SKKI	Reviu Dokumen	Tim Pengujian	Pengujian dilakukan dengan melakukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu Dokumen</li> <li>2. Konfirmasi kewajaran harga ke vendor</li> </ol>

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
							3. Pemeriksaan kesesuaian barang yang diserahkan dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen perikatan. 4. Evaluasi Rekanan yang terlalu sering melaksanakan kegiatan 5. Selanjutnya hasil disampaikan melalui forum pegawai untuk memastikan bahwa temuan ditindaklanjuti

## 2. Penguatan Integritas Eksternal

No	Momen Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
1	Kegiatan Bagian/Bidang yang melibatkan pihak eksternal	Min 1x	Bulan	Kepala Bagian/ Bidang terkait berkoordinasi dengan Bidang SKKI	Sosialisasi, Webinar FGD	Pihak Eksternal Kanwil DJPb	1. Pemutaran konten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor.</li> </ol> 2. Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)
2	Pembinaan KPPN	Min 1x	Semester	Kepala Bidang SKKI	FGD	KPPN	Materi Tambahan Pembinaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Internalisasi Kebijakan SDM ( Promosi, Mutasi, Penerimaan Pegawai Non ASN, Secondment, Diklat dan IJV beserta hasil evaluasinya)</li> <li>Sosialisasi anti korupsi, anti gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, kewajiban pelaporan LHK/LHKPN dan Kerangka Penguatan Integritas.</li> <li>Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan PBJ</li> </ol>

No	Momen Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
3	Penyerahan DIPA	1x	Tahunan	Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang SKKI			<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemutaran konten/video : <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>video promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ol> </li> <li>Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan pada media sosialisasi (ppt, baner dll)</li> </ol>

### 3. Penguatan Integritas Melalui Strategi Komunikasi dan Internalisasi

No	Substansi Penguatan	PIC	Target Konten/ Viewer	Materi Konten	Media dan Frekuensi Penayangan
1	Pesan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi melalui berbagai media	Seluruh Kepala Bagian/ Bidang	Pihak Internal Pihak Eksternal	Desiminasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesan Anti Korupsi</li> <li>larangan menerima gratifikasi</li> <li>kewajiban melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi</li> <li>mekanisme pelaporan gratifikasi</li> <li>promosi Unit Pengendali Gratifikasi dan Aplikasi GOL)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naskah Dinas : dibuat pesan menjaga integritas, anti korupsi dan anti gratifikasi pada setiap paragraph akhir naskah dinas.</li> <li>Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Penayangan konten Desiminasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi minimal 1 minggu 1 kali</li> <li>Elektronik Banner pada ruang layanan : dilakukan pembaruan konten secara triwulanan.</li> </ol>



No	Substansi Penguatan	PIC	Target Konten/ Viewer	Materi Konten	Media dan Frekuensi Penayangan
2	Amplifikasi konten standar layanan unit kerja dan hasil evaluasi kepuasan layanan	Seluruh Kepala Bagian/ Bidang	Pihak Internal Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar layanan unit kerja</li> <li>hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali</li> <li>Elektronik Banner</li> </ol>
3	Promosi Saluran Pengaduan Online	Kepala Bidang SKKI dan Kepala Bagian umum	Pihak Internal Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amplifikasi konten sarana pengaduan online</li> <li>Amplifikasi konten kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan</li> <li>Pencantuman sarana pengaduan WISE dan Sipandu pada web Unit</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali</li> <li>Elektronik Banner</li> <li>Media Sosialisasi (Banner , Backdrop, VB)</li> <li>Website unit kerja</li> </ol>
4	Amplifikasi konten/video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.	Kepala Bagian Umum Kepala Bidang SKKI	Pihak Internal Pihak Eksternal	konten/video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali</li> <li>Elektronik Banner</li> </ol>

## B. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

### 1. Penguatan Integritas Internal

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
1	Doa bersama dan arahan pagi	1x	Hari	Kepala KPPN/ Pejabat Pengawas	Briefing	Seluruh Pegawai	Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi
2	Morning Call	Min 1x	Minggu	Kepala KPPN	Rapat Internal	Seluruh Pejabat Eselon IV	1. Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi 2. Isu Terkait Integritas
3	Pelaksanaan senam/olah raga bersama	Min 1x	Minggu	Kepala KPPN	Outdoor	Seluruh Pegawai	1. Yel-Yel Integritas dan Semangat Anti Korupsi
4	Pembinaan Mental dan Kerohanian	Min 1x	Bulan	Kepala KPPN	GKM	Seluruh Pegawai	Materi tematik:: 1. Integritas seorang Pemimpin (Februari) 2. Jujur Dalam Segala Tindakan (Mei) 3. Penyalahgunaan Wewenang adalah Kezaliman (Agustus) 4. “Pencuri” dalam birokrasi (November)
5	Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja	Min 1x	Bulan	Kepala Seksi MSKI/VeraKI	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi tematik: 1. Kode Etik dan Perilaku Kemenkeu (Februari) 2. Pengelolaan Gratifikasi (Mei) 3. Penanganan Benturan Kepentingan (Agustus) 4. Sosialisasi Kewajiban Pelaporan LHKPN/LHK (November)
6	Evaluasi Pengelolaan SDM, Jafung, dan Kerumahtanggaan	Min 1x	Bulan	Kepala Subbagian Umum	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi tematik:: 1. Internalisasi Kebijakan SDM (rotasi, mutasi dan promosi) dan hasil evaluasi kebijakannya (Mei) 2. Internalisasi Kebijakan Rekrutmen Pegawai Non ASN hasil evaluasi kebijakannya (Agustus) 3. Internalisasi Kebijakan secondment, diklat dan IJV serta hasil evaluasi kebijakannya (November)

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
7	Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker	Min 1x	Bulan	Kepala Subbagian Umum Kepala Seksi MSKI/VeraKI	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi komplemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan PBJ dengan prinsip 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) serta bebas dari Penyalahgunaan anggaran, Korupsi dan KKN (April)</li> <li>2. Area rawan korupsi, suap dan gratifikasi di lingkungan DJPb (Juli)</li> <li>3. kebijakan perjadin, honorarium dan pelaksanaan kegiatan rapat diluar kantor (Oktober)</li> <li>4. Kebijakan Implementasi Gerakan Efisiensi (Desember)</li> </ol>
8	Capacity Building/Internal Gathering KPPN	Min 1x	Triwulan	Kepala KPPN	Rapat Internal	Seluruh Pegawai	Materi Komplemen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas dalam Pelaksanaan Tugas</li> <li>2. Implementasi Budaya Egaliter (Ngobrol Santai dengan Pimpinan)</li> <li>3. Menjaga Integritas diri, teman dan lingkungan Kerja</li> <li>4. Membangun negeri melalui Pelayanan ke Para <i>Stakeholders</i></li> </ol>
9	Townhall Meeting Penguatan Integritas	Min 1x	Triwulan	Kepala KPPN	Rapat Internal/ Outdoor	Seluruh Pegawai	Materi tematik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Integrity Is Our Identity</i> – Binalnas (April)</li> <li>2. Sosialisasi Anti Gratifikasi Mandiri – PPG (Juli)</li> <li>3. Sosialisasi Anti Korupsi (Oktober)</li> <li>4. Peringatan HAKORDIA (Desember)</li> </ol>
10	Pengujian Kepatuhan PBJ dan Pengelolaan Keuangan	Min 1x	Semester	Kepala Seksi MSKI/VeraKI	Reviu Dokumen	Tim Pengujian	Pengujian dilakukan dengan melakukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu Dokumen</li> <li>2. Konfirmasi kewajaran harga ke vendor</li> <li>3. Pemeriksaan kesesuai barang yang diserahkan dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen perikatan.</li> </ol>

No	Moment Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/ Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
							4. Evaluasi Rekanan yang terlalu sering melaksanakan kegiatan 5. Selanjutnya hasil disampaikan melalui forum pegawai untuk memastikan bahwa temuan ditindaklanjuti
11	Refresment Materi Terkait Tusi dan Service Excellent	Min 1x	Bulan	Seluruh Subbag/ Seksi Terkait	GKM	Seluruh Pegawai	Materi tematik:: 1. Hasil Diklat/Sosialisasi/ Workshop 2. Standard pelayanan masing-masing tusi 3. <i>Service Excellent</i>

## 2. Penguatan Integritas Eksternal

No	Momen Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
1	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L, BLU, BLUD	Min 1x	Bulan	Kepala Kantor	FGD	BLU/BLUD, Pemda	1. Pemutaran konten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ol> 2. Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)
2	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	Min 1x	Bulan	Kepala Seksi Vera/VeraKI	FGD	Satker, Pemda	1. Pemutaran konten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> </ol>

No	Momen Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
							<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ul> <p>2. Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)</p>
3	Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa	Min 1x	Bulan	Kepala Seksi MSKI/ VeraKI dan Kepala Seksi Bank	FGD	Satker Pemda, Perwakilan Desa	<p>1. Pemutaran konten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>b. film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>c. Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ul> <p>2. Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)</p>
4	Pemberdayaan UMKM	Min 1x	Bulan	Kepala Kantor/ Kepala Seksi	FGD	UMKM, Penyalur, Bank, LKBB	<p>1. Pemutaran konten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>b. film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>c. Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ul> <p>2. Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan pada media sosialisasi (ppt, banner dll)</p>

No	Momen Kegiatan	Frek	Satuan	PIC/Pemateri	Media	Peserta	Injeksi Materi
5	Asistensi dan Evaluasi Aplikasi SAKTI	Min 2x	Bulan	Kepala Seksi MSKI/VeraKI, Kepala Seksi MSKI/PDMS dan JF	Bimtek	Satker	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemutaran konten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ol> </li> <li>Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)</li> </ol>
6	Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual Account)	Min 2x	Bulan	Kepala Seksi Bank dan MSKI/PDMS	Bimtek	UMKM, Satker Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemutaran konten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>film pendek pesan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.</li> <li>Promosi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan.</li> </ol> </li> <li>Menambahkan konten anti korupsi dan gratifikasi serta informasi sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pada media sosialisasi (ppt, banner dll)</li> </ol>

### 3. Penguatan Integritas Melalui Strategi Komunikasi dan Internalisasi

No	Substansi Penguatan	PIC	Target Konten/ Viewer	Materi Konten	Media dan Frekuensi Penayangan
1	Pesan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi melalui berbagai media	Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi MSKI/VeraKI	Pihak Internal Pihak Eksternal	Desiminasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Pesan Anti Korupsi</li> <li>larangan menerima gratifikasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Naskah Dinas : dibuat pesan menjaga integritas, anti korupsi dan anti gratifikasi pada setiap paragraph akhir naskah dinas.</li> <li>Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Penayangan konten Desiminasi</li> </ol>

No	Substansi Penguatan	PIC	Target Konten/ Viewer	Materi Konten	Media dan Frekuensi Penayangan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• kewajiban melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi</li> <li>• mekanisme pelaporan gratifikasi</li> <li>• promosi Unit Pengendali Gratifikasi dan Aplikasi GOL)</li> </ul>	Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi minimal 1 minggu 1 kali 3. Elektronik Banner pada ruang layanan : dilakukan pembaruan konten secara triwulanan.
2	Amplifikasi konten standar layanan unit kerja dan hasil evaluasi kepuasan layanan	Seluruh Kepala Subbagian/Seksi	Pihak Internal Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar layanan unit kerja</li> <li>• hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan</li> </ul>	1. Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali 2. Elektronik Banner
3	Promosi Saluran Pengaduan Online	Kepala Seksi MSKI/VeraKI dan Kepala Subbagian Umum	Pihak Internal Pihak Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amplifikasi konten sarana pengaduan online</li> <li>• Amplifikasi konten kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor pengaduan</li> <li>• Pencantuman sarana pengaduan WISE dan Sipandu pada web Unit</li> </ul>	1. Media Sosial ( Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter) : Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali 2. <i>Electronic Banner</i> 3. Media Sosialisasi (Banner , Backdrop, VB) 4. Website unit kerja
4	Amplifikasi konten/video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.	Kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi MSKI/VeraKI	Pihak Internal Pihak Eksternal	konten/video pimpinan terkait integritas anti korupsi dan gratifikasi.	1. Media Sosial (Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter): Frekuensi Penayangan minimal 1 minggu 1 kali 2. <i>Electronic Banner</i>

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik  
Didyk Choiroel